

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepatuhan hukum tenaga kesehatan terhadap pelaksanaan kewajiban vaksinasi *covid-19* di Kabupaten Solok untuk pelaksanaan kewajiban Vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 dikategorikan sangat baik namun untuk vaksinasi dosis booster dikategorikan baik. Tingkat kepatuhan hukum Tenaga Kesehatan dari segi *compliance, identification dan internalization* berada dalam kategori sangat baik.
2. Faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum tenaga kesehatan terhadap pelaksanaan kewajiban vaksinasi *covid-19* di Kabupaten Solok dari lima (5) faktor penegakan hukum dalam penelitian ini yang lebih dominan adalah faktor masyarakat hukum dan budaya hukum. Dilihat dari segi pendidikan sebagaimana telah dijelaskan tenaga kesehatan merupakan masyarakat dengan pendidikan tinggi. Pengetahuan hukum mereka juga tinggi namun demikian perilaku hukum mereka masih kurang dibuktikan dengan masih rendahnya cakupan vaksinasi dosis booster dan hasil kepatuhan hukum dilihat dari segi *Compliance*.

Semua itu bisa disebabkan faktor dari dalam diri masing-masing individu, mereka mematuhi hukum bukan dari keyakinan kepada hukum itu sendiri namun hanya sekedar mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan dan yang dilaksanakan oleh komunitas dalam organisasi mereka berada. Disaat tenaga kesehatan tidak melaksanakan vaksinasi menyebabkan tidak bisa melaksanakan perjalanan luar daerah sehingga berdampak kepada kurangnya income mereka, disaat tidak divaksin mereka tidak menerima tunjangan daerah, dan juga menjadi bahan pembicaraan negatif dalam organisasi itu sendiri. Setelah beberapa waktu berjalan sanksi-sanksi tersebut mulai mengendor, yang tidak divaksin pun masih merima tunjangan sehingga kemauan mereka untuk melaksanakan kewajiban juga ikut menurun. Itu semua dapat dilihat dari hasil cakupan dosis vaksinasi booster yang menurun.

B. Saran

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok selaku pemangku kebijakan tertinggi pada Dinas Kesehatan perlu meningkatkan pengetahuan Tenaga Kesehatan tentang kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dalam rangka pelaksanaan optimalisasi peningkatan kepatuhan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan kewajiban Vaksinasi harus lebih aktif melakukan hal-hal efektif seperti dengan melaksanakan sosialisasi dan penerangan hukum bagi tenaga kesehatan.

3. Bagi tenaga kesehatan semestinya lebih meningkatkan kepatuhan hukumnya untuk melaksanakan kewajiban terutama vaksinasi *Covid-19* melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman mereka akan hakekat pelaksanaan vaksinasi *covid-19* untuk mewujudkan Indonesia Sehat dan Ekonomi bangkit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Z. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang
- Aprita, S.2020, *Filsafat Hukum Vol 148*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Bambang, S.2003. *Metodologi penelitain Hukum*, Cetakan ke-6, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dirjosisworo S.1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Marzuki, M.2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Kencana Prenaada Media Grup, jakarta
- Kementrian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Jakarta Selatan: Kementrian Kesehatan RI.
- Muhammad, A. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Notoatmodjo, S. 2010, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nurhayati, Y 2020, *Pengantar Ilmu Huku*, Cetakan ke-1, Nusa Media, Bandung
- Raharjo, S 2010, *Sosiologi Hukum*, Cetakan ke-II, Genta Publishing, Yogyakarta
- . 2019, *Teori Hukum*, Cetakan ke-V, Genta Publishing, Yogyakarta
- . 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8, Citra Aditia Bakti, Bandung
- Soekanto, S 1986, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta,
- . 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta
- . 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,: PT.

Raja Grafindo Persada. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)*

Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor Hk.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Bupati Solok Nomor 25 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Hidup Baru Dalam Rangka Antisipasi dan Penanganan Corona Virus Desease di Kabupaten Solok

C. Sumber Lain

Bappedda Kota Binjai, 2022, *Pentingnya Vaksinasi di Masa Pandemi Covid-19, 25 Mei 2022*, <http://bappeda.binjaikota.go.id/archives/667>

Ellya Rosana, 2014, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal TAPIs, Volume 10, Nomor 1 Januari-Juni 2014, 1-25*

Harahap SW, 2021, *Jejak Perjalanan Pandemi Virus Corona Setahun di Indonesia, 3 Maret 2021*, <https://www.tagar.id/jejak-perjalanan-pandemi-virus-corona-setahun-di-indonesia>

- Hendra Lesmana, 2021, 'Vaksinasi Masal Covid-19 Sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law) Puskesmas Angsana dan kegiatan Posko PPKM', Seminar Nasional pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, E-ISSN: 2714-6286, 1-6
- Hidayat A. *Simple Random Sampling Jenis dan Contoh*. 23 Januari 2021,1-6.
<https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html>
- Jesica Moudy, Dkk.2020, Pengetahuan Terkait Usaha Pencegahan Corona Virus , Desease (COVID-19) di Indonesia, *Hegeia Journal of Public Health Research anf Development*, Volume 4 Nomor 3, p ISSN 1475-362846 e ISSN 1475-222656, 333-346
- Kompas , 2020, *Kronologi Pandemi Covid-19 hingga Program Vaksin*, 24 Desember 2020,
<https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/24/120000223/kaleidoskop-2020--kronologi-pandemi-covid-19-hingga-program-vaksin?page=all>
- Kornelius Benuf, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011), Volume 7 Edisi I Juni 2020, 20-33
- Nurul Aeni, 2021, Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial, *Jurnal Litbang Vol. 17 No. 1 Bulan Juni 2021*, 17-34
- Riyanto A, 2018, *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*, Desember 2018,
<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>
- Sukardi, 2021 "Kesadaran Hukum Atau Kepatuhan Hukum Di Masa Pandemi Covid-19."INVESTORid , 1Agustus 2021, <https://ivestor.id>
- Sudjana, 2019. *Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000*, Hukum Ekon Syariah:Al Anwal, Volume 2 Nomor 1 Agustus 2019, 78-94
- Uning Pratimaratri,Dkk, 2015, *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta, Padang, halaman 1-22
- Walsyukurniat, 2020, *Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap*

Pandemi Covid-19, Jurnal Education and Development Institut
Pendidikan Tapanuli Selatan, Volume 8 Nomor 2, 242-248